

Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep *International Non- Governmental Organization*

Pada dasarnya hubungan internasional mempelajari perilaku internasional, yaitu peranan aktor negara (*state actors*) maupun (*non-state actors*) didalam hubungan internasional pun ada organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan agar keberlangsungan dalam melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Organisasi internasional dalam interaksi hubungan internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh terhadap interaksi antara aktor hubungan internasional. Hal lainnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional. Organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi internasional terdiri dari unsur-unsur, kerjasama yang ruang lingkungannya melintasi batas negara, serta mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama baik antara pemerintah atau non-pemerintah, struktur organisasi yang jelas dan juga lengkap. Peran *Non-Government Organization* (NGO) dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi semakin signifikan terutama setelah Perang Dingin berakhir. Dalam tiga dekade terakhir NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keragaman isu yang menjadi perhatiannya. Konsep NGO itu sendiri belum menemukan bentuk yang pasti dan masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pendefenisannya.

Menurut Tujil: “NGO dapat didefenisikan sebagai organisasi independen, non-partisan, non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang

termarjinalkan.”¹ NGO bukanlah bagian dari pemerintahan namun merupakan elemen dari masyarakat madani yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dengan melakukan tindakan nyata dan merupakan sebuah organisasi independen yang bersifat sosial.

Definisi NGO menurut Lewis adalah: “Organisasi non-pemerintahan merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik.”²

NGO bertujuan didasarkan pada kepentingan bersama dalam isu-isu spesifik, dengan berbagai variasi fungsi sebagai pelayanan jasa dan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki perhatian kepada pemerintah terutama dalam hal advokasi dan monitor kebijakan, serta menggerakkan partisipasi politik melalui informasi yang tersedia. NGOs dapat diartikan sebagai sarana progresif untuk perubahan, adapun untuk pengelolaan sistem politik dan sosial yang ada, pada intinya INGOs merupakan solusi berbasis pasar untuk permasalahan politik.

Fungsi operasional dari NGO terkait dengan merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan kondisi orang, artefak budaya, atau lingkungan alam misalnya pembangunan, bantuan pangan, perawatan kesehatan, perlindungan bangunan bersejarah, perlindungan kesehatan hewan, konservasi alam dan lain-lain. Adanya fungsi dari advokasi dari NGO bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, kebijakan, dan praktik otoritas nasional dan internasional pemerintah, kelompok sosial, badan usaha, dan masyarakat umum. Walaupun mereka tidak bisa langsung berorientasi pada perubahan kondisi realitas, namun mereka dapat melakukan dengan cara mempengaruhi perantaranya.³

Saat ini kajian ilmu politik lingkungan hidup berada dibawah disiplin ilmu politik, dimana menganalisa tentang peranan negara, lembaga-lembaga internasional,

¹ Peter Van Tujil. NGOs and Human Right: Sources of Justice and Democracy. Dalam *Jurnal of international affairs*, Vol.52. No: 2. Spring, 1999. Hal 495.

² Hurwitz, Leon. Robert Jordan and Werner Feld. *International Organization a Comparative Approach*. (New York: Praeger Publisher, 2001), hlm 29

³ Lewis, David and Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. (New York: Routledge, 2009), hlm 68

ekonomi politik global, kekuasaan, norma dan ideologi, dan teori-teori hubungan internasional. Beberapa ahli dalam melihat isu lingkungan ini ada pada kajian literatur atas negara dan tata kelola global. Politik lingkungan hidup melekat pada teori hubungan internasional dari rezim-rezim lingkungan. Adapun yang beranggapan bahwa politik lingkungan hidup mempelajari dampak-dampak ekologi dari ekonomi global, misalnya politik pertumbuhan, korporasi, perdagangan, konsumsi dan finansial.

Meskipun banyak yang berpendapat bahwa beragam riset yang menggunakan perspektif lingkungan hidup. Dauvergne menegaskan bahwa: “Sumbangan dan kontribusi utama dari kajian politik lingkungan hidup ini adalah meluasnya area riset interdisipliner dalam politik dan lingkungan ini”.⁴ Sejarah dari penelitian mengenai kajian politik lingkungan hidup global dimulai bersamaan dengan perubahan lingkungan global itu sendiri. Meletakkan kata lingkungan dibelakang istilah politik atau sosial dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Dauvergne, melihat bahwa: “Kajian politik lingkungan hidup kedepan akan melampaui bidang politik, termasuk ilmu hubungan internasional dan hukum internasional. Hal ini dilihat dari isu-isu yang saat ini terus berkembang seperti perubahan iklim, pemanasan global, air bersih, keanekaragaman hayati, deforestasi dan sebagainya yang menuntut bentuk penelitian yang multidisiplin”.⁵

Kajian-kajian politik lingkungan kedepannya akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana lingkungan hidup itu berubah demikian drastis dari pada cerita tentang formasi kelembagaan politik yang selama ini banyak mendominasi teori politik lingkungan hidup yang normatif. Meskipun kajian tentang kekuatan masyarakat sipil global, etika global, hingga kapitalisme global akan tetapi menjadi tren tersendiri dari para sarjana-sarjana politik lingkungan hidup.

⁴ Dauvergne, Peter. *Handbook of Global Environmental Politics*. (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2005), hlm 8.

⁵ Dauvergne, Peter. *Handbook of Global Environmental Politics*. (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2005), hlm 21.

2.2 Konsep Ecotourism

Mengembangkan ecotourism dilaksanakan dengan cara pengembangan pariwisata pada umumnya. Ada dua aspek yang perlu dipikirkan. Pertama, aspek destinasi, kemudian kedua adalah aspek market. Untuk pengembangan ekowisata dilaksanakan dengan konsep *product driven*. Meskipun aspek market perlu dipertimbangkan namun macam, sifat dan perilaku obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk menjaga kelestarian dan keberadaannya.

Pada hakekatnya ecotourism yang melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebab ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan psikologis wisatawan. Ekotourism adalah perjalanan wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peran aktif dalam mengelola potensi ecotourism ini penting karena pengetahuan alam dan potensi budaya memiliki nilai jual sebagai daya tarik ecotourism. Perkembangan ecotourism mempengaruhi masyarakat pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

1. Konservasi hutan adalah suatu pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan secara berkesinambungan yang dilakukan terhadap sesuatu untuk menghindari kepunahan dan rusaknya dengan cara mengawetkan, melestarikan, atau mengefisienkan penggunaannya.
2. *Ecotourism*/ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
3. *Ecotourism* berbasis masyarakat merupakan usaha ekotourism yang menitik beratkan peran aktif masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata,

sehingga melibatkan masyarakat. Pola ekoturisme berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola.

2.3 Teori *People Centered Development*

Menurut David C. Korten, mengatakan bahwa, “Teori Praktik Konvensional menunjukkan bahwa tanggung jawab dan mengelola serta mendistribusikan sumber daya pembangunan ditangan Pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang optimal, Namun kenyataannya, Pemerintah memiliki keterbatasan kebijakan dan kemampuan dalam mengatasi isu yang terjadi di masyarakat. Kemudian, David C. Korten mengatakan bahwa saat ini kehidupan masyarakat sedang mengalami kritis. Sehingga masyarakat harus berani membuat perubahan, perubahan tersebut dapat diambil menggunakan konsep pembangunan alternatif yang menempatkan pembangunan berbasis rakyat atau *people centered development* dan yang menjalankannya adalah organisasi non-pemerintah yang terbentuk atas inisiatif masyarakat atau individu.

Peran individu bukan hanya sebagai subjek melainkan sebagai aktor yang merumuskan tujuannya sendiri, mengendalikan sumber daya itu sendiri dan mengarahkan proses dengan tujuan akan bermanfaat bagi kehidupannya. Substansi dari *people centered development* menempatkan posisi pada inisiatif lokal dengan demikian individu mempunyai kemampuan untuk mengelolanya sendiri.

People centered development menggunakan kerangka ekologi dan masyarakat dalam menganalisa kinerjanya dan tidak hanya menginternalisasi masyarakat dan lingkungan, tetapi menjadikan keduanya sebagai dasar proses analisa.

Ada tiga tahap dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu:

1. Pembangunan sosial
2. Pembangunan berwawasan lingkungan
3. Pembangunan yang berpusatkan pada rakyat

Kemudian pengertian tentang paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) dimulai dengan pemahaman tentang ekologi manusia, ekologi manusia pada ekosistem adalah suatu kajian dari ekologi karena

menurut, Soerjani (1992:12) menjelaskan bahwa ekosistem dikaji oleh ekologi dan lingkungan hidup dikaji oleh ilmu lingkungan yang landasan pokoknya adalah ekologi. Pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia, yang menjadi pusat pembangunan pada rakyat. Strategi pembangunan berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka, tujuan objektif dalam strategi pembangunan berpusat pada rakyat pada intinya memberantas kemiskinan, realisasi keadilan distributif dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata.

Menurut Korten (1993) menjelaskan bahwa konsep pembangunan pada rakyat adalah melihat kreatifitas dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama untuk memandang kesejahteraan material dan spriritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Lebih lanjut Korten mengatakan bahwa ada tiga tema yang dianggap penting untuk menentukan bagi konsep yang berpusat pada rakyat, yaitu :

1. Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvesional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin.
3. Kebutuhan dan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Selanjutnya Soerjani juga menjelaskan bahwa ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal-balik makhluk hidup (biotik) dengan benda-benda non-hidup (*abiotic*) di sekitarnya. Jadi, Ekologi adalah ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup dan lingkungannya.

Pembangunan harus memberikan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus memberikan keuntungan kepada semua pihak, seperti masalah kemiskinan, kelompok rentan dan pengangguran mendapatkan perhatian utama karena akan menjadi penyebab instabilitas yang membawa pengaruh negatif, seperti jauhnya ikatan-ikatan sosial dan menurunnya nilai-nilai dan hubungan antara manusia.

Untuk itu komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dengan cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat kecil, meningkatkan keterpaduan sosial antara politik yang didasari hak asasi, non diskriminasi dan juga memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung sehingga terwujudnya hakekat dari paradig pembangunan berpusat pada rakyat.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan kaitannya dengan pembangunan mulai dikenal di kalangan pemerintah di dunia pada tahun 1972 dan sejak itu mulai dirintis berbagai langkah untuk mengembangkan pola untuk tidak merusak lingkungan (Emil, 1990). Konferensi PBB untuk lingkungan hidup Juni 1972 di Stockholm, Swedia, yang merupakan titik awal berkembangnya paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun di Indonesia baru saja memuat pertimbangan lingkungan dalam pembanguna sejak Repelita II (1979-1983) yang sejak saat itu diusahakan sebagai alat kebijakan pembangunan yang mengatur dampak negatif dan meningkatkan dampak positif pembangunan terhadap lingkungan.

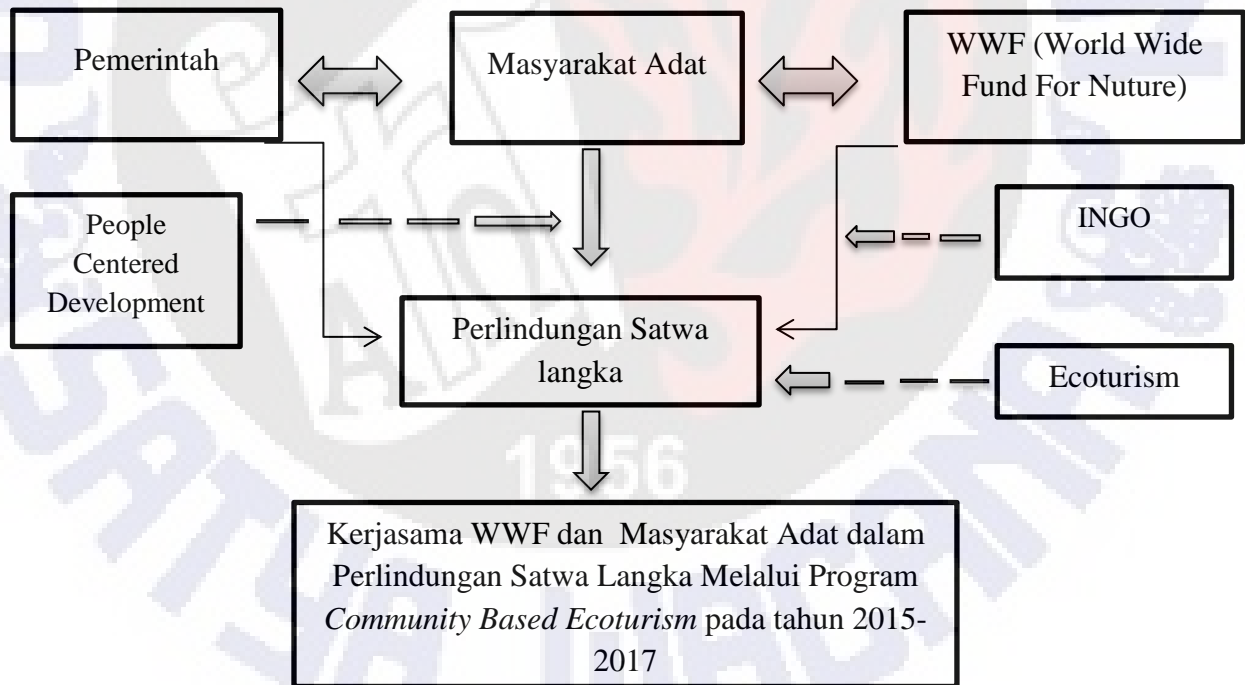
Kemudian dalam buku “Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1992: 20 tahun setelah Stokholm” yang ditulis oleh Surna dan Harry (1992: 7-9) dijelaskan tentang perkembangan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan (*environmental development*). Konferensi Stockholm dengan slogannya Hanya Satu Bumi, yang ingin mencoba membangkitkan kepedulian negara-negara di dunia untuk permasalahan lingkungan dan mencoba untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang sebaiknya dicapai melalui kerjasama dan perjanjian internasional.

Masyarakat adat kampung Rhepang Muaif menyadari bahwa mereka memiliki alam yang bisa digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi untuk masyarakat asli mereka, sebelum dikenal sebagai *ecotourism* masyarakat asli Rhepang Muaif sering berburu dan menggunakan hutan sebagai tempat mereka mencari makan, mereka

memegang adat bahwa hutan tidak boleh dirusak untuk generasi mereka kedepan, untuk itu melalui Bapak Alex yang berkerjasama dengan WWF, mereka kemudian membuat tempat *ecotourism* untuk membantu masyarakat asli untuk menaikkan perekonomian, namun masyarakat asli masih bisa berburu tetapi harus melalui ijin oleh ondo atau kepala adat dan harus berburu hewan yang tidak dilindungi dan dilarang berburu hewan yang dilindungi.

Demi untuk terwujudnya program yang ada di dalam WWF itu sendiri. Dalam pembahasan penulis ada namanya program *community based ecotourism* dimana dalam program ini terkait dengan campur tangan masyarakat adat secara langsung untuk mengelola satwa yang dimiliki masyarakat Rhepang Muaif, sehingga teori yang penulis pakai bisa membantu penulis dalam melakukan penelitian

2.4 Kerangka Bepikir



WWF indonesia sebagai INGO bekerjasama dengan Masyarakat adat di Rhepang Muaif yang bertindak sebagai masyarakat adat yang langsung mengambil bagian dalam kerjasama dengan WWF untuk melindungi satwa langka yang ada di wilayah Rhepang muaif, melalui kerjasama dengan pemerintah, pemerintah melalui

BUMN memberikan bantuan melalui 7 BUMN yaitu PT Telkom Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Bank BNI Tbk, PT.Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT PLN. yang diharapkan dapat digunakan untuk mengelolah dan menjaga tempat wisata Rhepang Muaif. Penulis menggunakan teori *People Centered Development* melihat bahwa di Rhepang Muaif masyarakat yang bertindak secara langsung mengelola satwa yang dimiliki masyarakat Rhepang Muaif dan mengembangkan hutan mereka menjadi tempat wisata. Sehingga dapat melihat bagaimana kerjasama WWF bersama masyarakat dalam melindungi satwa langka.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai WWF bukan hal baru karena telah ada penelitian terdahulu yang ditulis oleh beberapa orang. Pada penelitian skripsi milik Jeane Putri Pratiwi tahun 2017, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Pasundan Bandung. membahas mengenai *PERAN WWF (WORLD WIDE FUND FOR NATURE) DALAM PELESTARIAN BADAK JAWA DI INDONESIA*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian analisis deskriptif dimana dijelaskan berupaya menggambarkan kenyataan dengan situasi berdasarkan konsep-konsep yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku dan sumber artikel. Hasilnya mengatakan bahwa Badak Jawa merupakan salah satu spesies badak dari lima jenis badak yang ada di dunia. Yang saat ini populasinya hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon Banten Indonesia saja. Terdapat dua spesies badak yang terdapat di Indonesia, Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dan Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*).

Kedua spesies ini sama-sama memiliki jumlah yang sangat sedikit dan terhitung langka, terutama badak Jawa. Saat ini, badak Jawa menjadi spesies yang sangat dilindungi karena statusnya yang mendekati kepunahan. Faktor lingkungan menjadi hal yang utama sebagai hambatan dari populasi ini. Penyebaran badak Jawa yang hanya berada di satu tempat menimbulkan banyak ancaman jika terjadi bencana alam atau wabah penyakit pada kawasan tersebut. Perburuan liar juga masih menjadi ancaman bagi badak bercula satu tersebut. Hal ini sudah menyita perhatian dari

banyak pihak, selain pemerintah Indonesia mata internasional pun turut peduli dengan masalah ini.

Pada penelitian skripsi milik Dio El Islami Tahun 2019, mahasiswa fakultas ilmu social dan politik, Universitas Pasundan Bandung. *PERAN ORGANISASI WORLD WIDE FUND (WWF) dalam KONSERVASI ORANG UTAN (Studi Kasus Orang Utan Kalimantan)*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengklarifikasi suatu objek berdasarkan fakta aktual. Dengan metode ini, data yang dikumpulkan, diklarifikasikan, diolah dan kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori yang berlaku untuk memberi gambaran mengenai hasil penelitian. Dalam pembahasannya mengatakan bahwa Orangutan adalah Pemanjat Mamalia terbesar yang ada di dunia, Orangutan menjadi issue dalam dunia Hubungan Internasional karena termasuk ke dalam issue environmental karena Orangutan menjaga hutan Kalimantan. pada Penelitian ini penulis akan membahas tentang bagaimana peran WWF dalam konservasi Orangutan Kalimantan dimana seiring berkembangnya zaman jumlah orangutan yang ada di Kalimantan terus berkurang akibat deforestasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mempermudah dalam memahami Penelitian yang peneliti bahas dalam penulisan skripsi ini, maka menulis mencantumkan beberapa teori yang relevan dengan Isu Hubungan internasional yang penulis angkat diantaranya; teori Hubungan Internasional, Teori Organisasi Internasional, Teori Non-Government Organisasi.

Pada penelitian skripsi milik Anisa Intan Permatasari 2019, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Pasundan Bandung. *PERAN WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DALAM KONSERVASI GAJAH SUMATERA DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO RIAU*. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi deskriptif yang bertujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki. Dalam pembahasannya mengatakan bahwa World Wide Fund For Nature (WWF) memperkenalkan Tim Patroli Gajah Flying Squad

pertama di Desa Lubuk Kembang Bunga yang berada di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo yang baru ditetapkan. Tim ini, yang terdiri dari sembilan pawang dan empat gajah latih, mengarahkan gajah-gajah liar untuk kembali ke hutan apabila mereka memasuki ladang maupun kebun milik masyarakat desa tersebut. Sejak mulai beroperasi, WWF – Indonesia juga menggunakan GPS Collar untuk memantau pergerakan gajah, dan Social Development di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Riau. Dalam suatu kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, adapun beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelestarian gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, untuk mengetahui peran WWF terhadap keberadaan gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo dan untuk mengetahui implementasi program WWF terhadap penanganan pelestarian gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo. Hasil dari penelitian ini WWF – Indonesia di dalam melakukan konservasi gajah sumatera membuat program Tesso Nilo di Riau yang diluncurkan pada tahun 2004 untuk mengawasi keberadaan dan status hutan bernilai konservasi tinggi di provinsi Riau dengan membuat Tim Patroli Gajah Sumatera Flying Squad , memakai GPS Collar dan Social Development tidak berjalan dengan lancar dalam menjalankan program tersebut di dalam menurunkan angka kematian gajah sumatera maupun menambah populasi gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo.

Pada penelitian skripsi milik Anggi Wahyuni 2019, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Pasundan Bandung. *PERAN WORLD WIDE FUND for NATURE (WWF) DALAM MENGATASI PERBURUAN HIU DI INDONESIA*. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, mengklarifikasikan, serta menganalisis gejala-gejala atau fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dari berbagai kejadian dan masalah yang akurat. Dalam pembahasannya mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya laut yang melimpah. Sumber daya laut tersebut mencakup 37% spesies ikan di dunia. Salah satu spesies ikan yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Hiu. Hiu merupakan satu dari banyaknya jenis ikan di dunia yang memiliki tulang rawan. Data Badan Pangan Dunia (FAO) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara penangkap hiu terbesar di

dunia. Rata-rata produksi tahunan Indonesia yang dilaporkan dari tahun 2000-2011 mencapai 106.000 ton atau setara 13% dari total tangkapan dunia. World Wide Fund for Nature (WWF) adalah organisasi non pemerintah yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan. WWF merupakan salah satu organisasi yang peduli terhadap ancaman terhadap hiu akibat perburuan. Untuk mengatasi perburuan hiu di Indonesia, WWF mengeluarkan kampanye #SOSsharks (Save Our Sharks) selain itu WWF bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Simposium Hiu dan Pari di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kondisi perburuan hiu di Indonesia dan bagaimana peran WWF dalam mengatasi perburuan hiu di Indonesia. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran WWF di Indonesia.

Pada penelitian skripsi milik Imelda Lasty Zubaeda tahun 2017, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Pasundan Bandung. PERANAN WWF (WORLD WIDE FUND FOR NATURE) DALAM UPAYA KONSERVASI BIODIVERSITY (Studi Kasus Konservasi Penyu Belimbing Papua). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif yang dijelaskan berupaya menggambarkan kenyataan dengan situasi berdasarkan konsep yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitiannya yaitu data sekunder, yang dimana data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian studi pustaka yang terdiri dari buku-buku dan sumber-sumber artikel. Dalam pembahasannya mengatakan bahwa Penyu belimbing (*Dermochelys Coriacea*) adalah penyu tertua berasal lebih dari 60 juta tahun yang lalu. Penyu belimbing (*Dermochelys Coriacea*) merupakan penyu terbesar yang pernah hidup, dan memiliki sebaran geografis yang paling luas untuk jenis reptil. Luasan habitatnya membentang dari kawasan pantai peteluran didaerah tropis sampai kawasan sub tropis yang bersuhu lebih rendah, Jumlah populasi penyu belimbing yang bertelur adalah sekitar 34.000 ekor penyu betina. Penyu betina umumnya bertelur jika mereka sudah mencapai umur 10 tahun, sayangnya dari puluhan telur yang dihasilkan hanya ada satu tukik (bayi penyu) yang mampu bertahan hingga dewasa (10 tahun). Penyu belimbing merupakan pengelana samudera dari masa

lampau, telah hidup di ekosistem laut sejak lebih dari 150 juta tahun lalu. Walaupun penyu belimbing telah di lindungi melalui berbagai hukum dan perjanjian internasional, namun populasinya cenderung menurun menunjukkan angka penurunan yang mengkhawatirkan akibat eksploitasi perdagangan maupun konsumsi telur, pembangunan yang merusak kawasan pantai peteluran, terjerat alat tangkap ikan, polusi air laut dan sampah yang tertelan oleh penyu. Hal ini sudah menyita perhatian banyak pihak selain pemerintah Indonesia, mata internasional pun turut peduli dengan masalah ini. Seperti contoh banyaknya organisasi-organisasi internasional yang turut membantu dalam pengembangbiakan spesies ini. Organisasi Internasional non pemerintah yang bergerak dalam hal kepedulian terhadap lingkungan.

Penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kesamaan dengan dua penelitian diatas, yakni dalam hal jenis penelitian dan jenis data. Akan tetapi dari segi pembahasan tentunya berbeda karena peneliti akan membahas “Kerjasama WWF dengan masyarakat dalam perlindungan satwa langka melalui program *Community Based Ecotourism* di Papua pada tahun 2015-2017”. Adapun perbedaan lainnya adalah batas wilayah serta penggunaan teori. Perlindungan satwa di Papua tidak lepas dari peran WWF sebagai lembaga yang merupakan INGO di dalamnya akan dianalisis menggunakan teori *People Centered Development*.